

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PEMBELIAN OBAT WAJIB APOTEK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

INDAH FITRISKA AZAHARA

201000474201033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2024

No.Registrasi : 518/FHUK-UMMY/IV-2024

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PEMBELIAN OBAT WAJIB APOTEK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Nama: Indah Fitriska Azahara, Npm: 201000474201033, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr. Yulia
Nizwana S.H, M.H, Pembimbing II: Rifqi Devi Lawra, S.H, M.H, Tahun: 2024.*

ABSTRAK

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, menyatakan Obat Wajib Apotek yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan pembelian Obat Wajib Apotek di Indonesia dikaitkan dengan teori perlindungan hukum?, 2) Bagaimana tinjauan yuridis tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian Obat Wajib Apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Nomatif dengan cara menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa pembelian Obat Wajib Apotek di Indonesia diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek. Pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan 2 sarana perlindungan hukum yaitu: 1) perlindungan hukum preventif, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan pemenuhan hak-hak konsumen dan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha. 2) perlindungan hukum represif, pelaku usaha yang lalai melakukan kewajibannya akan dibebankan tanggung jawab pelaku usaha sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tinjauan yuridis tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian Obat Wajib Apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan kepada para pihak terkhususnya konsumen. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewa Gde Rudy, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Direktorat Pembinaan SMK, 2013, *Perundang-undangan Kesehatan*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Haeria, 2017, *Pengantar Ilmu Farmasi*, Makassar: UIN Alauddin.
- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Qustulani, 2018, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Nuryati, 2017, *Farmakologi*, Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2380/SK/VI/1983 tentang Tanda Khusus Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek No. 1 jo Keputusan Menteri Nomor 924/Menkes/Per/x/1993 tentang Obat Wajib Apotek No. 2 jo Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotek No. 3

C. Jurnal

Asri Simpati Siregar, *Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 7, No. 2, 2023.

Eko Priyono, Agus Surono, dan Sadino, *Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN)*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan, Vol. 7, No. 02, Juli 2022.

Lalu Mariawan Alfarizi dan Baiq Fitria Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelalaian Apoteker Dalam Memberikan Resep Obat Pada Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 2, No. 1, 2022.

Merida Kristin, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmu Hukum, 2021.

Rahmadi Mulyo Widiyanto, Farhan Saleh, dan Khusnul Yaqin, *Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, Oktober 2022.

Redyanto Sidi dan Andika Putra, *Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 03, 2022

Sabillah Utomo Putra, Bambang Eko Turisno, dan Suradi, *Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2016.

Sakirman, dkk, *Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Maraknya Monopoli Bisnis*, Siyasa Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.1, No. 1, 2022.

Salma Intan Saraswati, Made Warka, dan Sri Setyadji, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Yang Melanggar Kesusilaan*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3, No.4, September 2022.

Wanda Lisyanto Prabowo, *Teori Tentang Pengetahuan Peresepan Obat*, Jurnal Medika Utama, Vol. 02, No. 04, 2021.

Yulfasni dan Hamler, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cesionaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi*, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 6, No. 2, Januari 2023.

Yulia Rafitri dan Ferry Ferdian, *Identifikasi Medication Error Fase Prescribing, Transcribing, Dispensing Pada Pasein Rawat Inap Di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang*, Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.

D. Skripsi/Tesis

Adinda Agis Fitria Cahyani, *Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2022.

Alexander Victory, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Obat-Obatan Atas Informasi Obat Yang Beredar Luas di Pasaran Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Tiga Merek Obat Penghilang Gejala Flu*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Baharuddin, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G(Berbahaya) yang Sering Disalahgunakan di Wilayah Kerja Badan POM Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Chairunisa, *Tindak Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Hilda Muliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online*, Tesis, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020.

E. Website

F. Rifqi Rokhman, *Obat Wajib Apotek (Lengkap)*, diakses pada 29 November 2023 dari <https://m-rifqi-rokhman.staff.ugm.ac.id/>.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Jika Apoteker Lalai Dalam Memberikan Obat Kepada Pasien*, 2022, diakses pada 11 Januari 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-apoteker-lalai-lt55933d04bb967>

